

- Rizky Alif Alvian¹
Universitas Gadjah Mada

Menjadi Warga ASEAN: Anak Muda dan Politik Kewargaan di Asia Tenggara

ABSTRAK

Tulisan ini berusaha untuk mendiskusikan bagaimana kewargaan anak muda di ASEAN dikonstruksi dan dipraktikkan. Dengan menganalisis sejumlah dokumen ASEAN serta menelaah sejumlah kasus, tulisan ini berpendapat bahwa kewargaan anak muda ASEAN dapat dipahami sebagai hasil dari tegangan antara dua kutub. Di satu sisi, terdapat kecenderungan untuk menuntut anak muda menjadi aktor yang relatif pasif. Anak muda diarahkan untuk mematuhi otoritas dan generasi tua, mengutamakan harmoni dan konsensus, menjauhi konflik serta kritik, serta mengutamakan nilai-nilai Timur di atas konsepsi Barat mengenai HAM dan demokrasi. Di lain sisi, terdapat kecenderungan di antara anak muda untuk menjadi lebih aktif. Anak muda menjadi aktor yang mengkritisi status quo, berani melakukan konfrontasi dengan otoritas, serta memperjuangkan demokrasi dan HAM.

Kata kunci: kewargaan, anak muda, ASEAN

ABSTRACT

This paper aims to discuss how youth citizenship in ASEAN is constructed and practiced. By analyzing several ASEAN documents and relevant cases, this paper argues that ASEAN youth citizenship could be understood as a result of a tension between two opposing poles. On the one hand, youth tends to be characterized as a passive agent. Youth is directed to obey the authority, respecting the older generations, prioritizing harmony and consensus over conflict and critique, and embracing Eastern values over Western conception of human rights and democracy. On the other hand, youth is also understood as an active agent. Youth is portrayed as a subject who dare to criticize the status quo, confront the authority, and fight for democracy and human rights.

Keywords: citizenship, youth, ASEAN

PENDAHULUAN

Selain berusaha mempromosikan integrasi ekonomi, ASEAN juga menetapkan integrasi politik dan budaya sebagai salah satu tujuannya. Dalam ASEAN Charter (2008: 5), ASEAN menuliskan bahwa ASEAN akan menciptakan “*a people oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participate in, and benefit from, the*

process of ASEAN integration and community-building”. Di samping itu, ASEAN juga berusaha menciptakan “*an ASEAN identity through the fostering of greater awareness of the diverse culture and the heritage of the region*”.

Meski demikian, integrasi politik dan budaya di atas merupakan sesuatu yang problematis. Pasalnya, masyarakat Asia Tenggara mula-mula memahami

¹ Penulis adalah mahasiswa S-1 Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Sebagian makalah ini sebelumnya telah dipresentasikan dengan judul ‘The Development of the Concept of Youth in Southeast Asia: Analyzing ASEAN’ pada International Conference on ASEAN Studies (ICONAS), 1-2 Oktober 2014.

dirinya sebagai warga dari negara-bangsa tertentu dan bukan ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN dituntut untuk menciptakan warga bagi dirinya sendiri. ASEAN dituntut untuk menciptakan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap ASEAN di antara masyarakat Asia Tenggara untuk kemudian mendorong mereka berpartisipasi dalam kerangka ASEAN (Jones, 2004). Sebagai bagian besar dari populasi ASEAN, anak muda di Asia Tenggara juga tak luput dari proses konstruksi ini.

Tulisan ini akan berbicara tentang bagaimana kewargaan anak muda di ASEAN dikonstruksi dan dipraktekkan. Tulisan ini berpendapat bahwa kewargaan anak muda ASEAN dapat dipahami sebagai tegangan antara perspektif ASEAN terhadap anak muda Asia Tenggara dengan perspektif anak muda Asia Tenggara terhadap diri mereka sendiri. Tegangan ini menjadi latar bagi praktek-praktek kewargaan yang dilakukan oleh anak muda di Asia Tenggara.

Untuk membuktikan argumen di atas, tulisan ini akan dibagi menjadi sejumlah bagian. Pertama, tulisan ini akan mendiskusikan konsep kewargaan anak muda. Kedua, tulisan ini akan membahas bagaimana konstruksi kewargaan anak muda ASEAN. Ketiga, tulisan ini akan mengambil sejumlah studi kasus yang dapat menunjukkan bagaimana konsep kewargaan anak muda yang dibangun oleh ASEAN dinegosiasikan oleh anak muda di Asia Tenggara. Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan.

KEWARGAAN ANAK MUDA

Dalam mendiskusikan konsep kewargaan anak muda, bagian ini mula-

mula akan mendiskusikan secara terpisah apa yang dipahami tulisan ini sebagai anak muda dan kewargaan. Setelah mendiskusikan kedua konsep tersebut, bagian ini akan melangkah lebih jauh untuk mendiskusikan konsep kewargaan anak muda.

Terdapat setidaknya dua cara untuk memahami anak muda. Cara pertama memahami anak muda *qua* anak muda. Ia didefinisikan dengan menggunakan usia dan tahapan psikologisnya sebagai kriteria. Dalam konteks Asia Tenggara, ada berbagai cara untuk mendefinisikan siapa anak muda dengan menggunakan cara ini. Indonesia mendefinisikan anak muda sebagai manusia berumur 16-30 tahun. Rentang waktu yang sama digunakan oleh Vietnam. Sementara itu, Kamboja, Laos, dan Filipina menggunakan kriteria umur 15-30 tahun untuk mendefinisikan anak muda. Malaysia dan Brunei Darussalam menggunakan kriteria 15-40 tahun. Myanmar memakai ukuran 16-18 tahun. Sementara itu, Singapura memakai dua jenis kriteria. Berdasar *Children and Young Persons Act*, anak muda berumur 14-16 tahun. Sementara menurut *National Youth Council*, anak muda didefinisikan sebagai mereka yang berumur 15-35 tahun. Thailand mendefinisikan anak muda sebagai mereka yang berumur 18-25 tahun.

Cara kedua memahami anak muda dalam relasinya dengan orang dewasa. Konsep anak muda menjadi bermakna sejauh ada konsep orang dewasa. Karenanya, konsep anak muda dan orang dewasa bersifat "*mutually constitutive*": keduanya saling mendefinisikan satu sama lain. Apa yang mendefinisikan anak muda sebagai anak muda adalah perbedaannya dengan orang tua dan begitu pula sebaliknya.

Dalam perspektif ini, anak muda

No.	Youth	Adult
1.	Not adult/adolescent	Adult/grown up
2.	Becoming	Arrived
3.	Presocial self	Identity is fixed
4.	Powerless and vulnerable	Powerful and strong
5.	Less responsible	Responsible
6.	Dependent	Independent
7.	Ignorant	Knowledgeable
8.	Risky behaviours	Considered behaviour
9.	Rebellious	Conformist
10.	Reliant	Autonomous

Tabel 1

Perbedaan Anak Muda dan Orang Dewasa

dibedakan dari orang dewasa mula-mula karena anak muda dianggap belum sempurna dan belum dewasa. Anak muda dipandang sebagai sosok yang berada dalam fase ‘menjadi’ (*becoming*). Anak muda sedang berada dalam fase bergerak sampai ia tiba pada titik akhir, yakni kedewasaan. Karenanya, kontras dengan anak muda, orang dewasa dipahami sebagai mereka yang telah tiba pada titik tujuan. Orang dewasa tak lagi ‘menjadi’. Ia telah ‘lengkap’ dan ‘sempurna’. Berbeda dengan anak muda yang labil, orang dewasa dipandang stabil. Anak muda masih berusaha mencari dan menemukan identitas dirinya. Sementara orang dewasa telah memiliki identitas diri yang tetap (Lam, 2013; Wyn dan White, 1997).

Dalam filsafat Yunani klasik, Plato dan Aristoteles memandang anak muda sebagai sosok yang tak sempurna. Plato memandang anak muda sebagai sosok yang tak memiliki kemampuan menalar yang baik. Sementara itu, Aristoteles melihat anak muda sebagai sosok yang

semata-mata berusaha mencari kenikmatan bagi diri sendiri. J.S. Mill lebih jauh berpendapat bahwa anak muda belum patut menerima kebebasan karena mereka belum cukup dewasa untuk menerimanya (Lam, 2013). Dalam tradisi pemikiran Konfusius, anak muda juga cenderung dipandang dengan cara serupa. Anak muda berada dalam proses menjadi manusia yang utuh yang ditandai dengan kedewasaan. Karenanya, dalam tradisi Konfusius, hierarki sosial antara lain ditentukan oleh usia (West, 2007).

Cara pandang di atas, ringkasnya, membebani anak muda dengan klaim ketidaksempurnaan. Sebaliknya, orang dewasa dianggap lebih sempurna. Konsekuensi dari cara pandang ini—yang *notabene* cukup dominan di berbagai kebudayaan—adalah timpangnya relasi kekuasaan antara anak muda dan orang dewasa. Orang dewasa memiliki kesempatan untuk mendominasi anak muda. Ketidaksempurnaan anak muda dipandang oleh orang dewasa sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Orang dewasa, yang diandaikan memiliki tingkat kesempurnaan lebih tinggi, harus menggunakan pengalamannya untuk membimbing anak muda. Orang dewasa memiliki hak untuk mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh anak muda. Orang dewasa juga memiliki hak untuk menginterpretasi realitas bagi anak muda. Dalam rangka melindungi anak muda, orang dewasa juga memiliki hak untuk mengatur perilaku anak muda. Partisipasi anak muda, pada gilirannya, juga dibatasi karena orang dewasa dipandang memiliki hak untuk memutuskan yang terbaik bagi anak muda. Besar kecilnya dominasi orang dewasa pada anak muda, karenanya, dapat dilihat berdasarkan sejauh mana anak muda diperkenankan untuk bertindak—

apa tindakan yang boleh dan tak boleh dilakukan oleh anak muda (Leccardi dan Ruspini, 1996; Alanen, 2011).

Dalam relasinya dengan anak muda, orang dewasa sebetulnya tengah menginternalisasikan nilai yang ia yakini kepada generasi yang lebih muda. Generasi di sini dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang terlahir dalam waktu yang relatif sama dan memiliki interpretasi yang relatif sejenis mengenai pengalaman hidup mereka. Karenanya, perbedaan di antara dua generasi—antara anak muda dan orang dewasa—bukan hanya meliputi perbedaan usia, tetapi juga perbedaan nilai dan perspektif (Alanen, 2011). Klaim orang dewasa bahwa mereka lebih sempurna menjadi basis bagi internalisasi nilai generasi tua terhadap generasi muda.

Hubungan antara entitas politik seperti negara atau organisasi regional seperti ASEAN dapat dipahami dengan memakai lensa yang sama terutama ketika entitas-entitas politik tersebut dikuasai oleh generasi tua. Dalam konteks ini, perspektif negara dalam memandang anak muda tak berbeda jauh dibandingkan dengan perspektif generasi tua terhadap anak muda. Negara pada umumnya cenderung melihat anak muda sebagai investasi masa depan. Pertama, anak muda digadang-gadang sebagai generasi yang akan memperkuat negara di masa depan—termasuk di antaranya dalam konteks persaingan ekonomi antar-negara. Fase anak muda menjadi fase dimana seseorang dilatih menjadi pekerja sebelum betul-betul menjadi pekerja di masa dewasa dan pensiun di masa tua (Clarke, 2010; Leccardi, 1996; Lewis, 2006; Lister, 2006). Kedua, anak muda dirancang sebagai pewaris nilai-nilai generasi tua. Anak muda menjadi agen yang mendukung imajinasi suatu masyarakat

tentang masa depan mereka sendiri. Ketika anak muda menyimpang dari standar norma generasi tua, maka akan tumbuh kegelisahan di kalangan generasi tua (Giroux, 2009).

Walau orang dewasa berada dalam posisi yang relatif lebih diuntungkan, anak muda sebetulnya tak berada dalam posisi yang sepenuhnya pasif. Anak muda memiliki kesempatan untuk menulis ‘biografi’-nya sendiri (lih. Lash, 2002; Beck, 2002, 1994; Giddens, 2008). Lebih jauh, anak muda juga dapat menegosiasikan perspektif generasi tua dengan perspektifnya sendiri.

Cara pandang di atas—yang menggarisbawahi relasi kuasa antara generasi tua dan generasi muda—memiliki implikasi terhadap konsep kewargaan anak muda. Tetapi, sebelum menganalisis implikasi tersebut, bagian ini akan terlebih dahulu mendiskusikan bagaimana konsep kewargaan akan dipahami oleh tulisan ini.

Turner (1993: 2) mendefinisikan kewargaan sebagai “*set of practices which define a person as a competent member of society, and which as a consequence shape the flow of resources to persons and social groups*”. Sementara itu, Jones dan Gaventa (2002: 13) menuliskan bahwa kewargaan adalah tentang bagaimana “*people see themselves as citizens and act upon this, and how this relates to their understanding of themselves in other aspects of life*”. Hal ini nantinya akan memberi “*a significant impact on their perception of their rights and obligations and on whether they participate, in what form and why*”. Sejumlah definisi ini menggambarkan kewargaan mula-mula sebagai sebuah *praktek*.

Sejumlah definisi di atas menggambarkan bagaimana konsep kewargaan dapat dipahami. Kewargaan

dapat dipahami sebagai *praktek* keanggotaan seseorang di dalam suatu komunitas politik. Dengan menjadi anggota sebuah komunitas politik, seseorang dapat berpartisipasi dengan cara tertentu serta memiliki serangkaian hak dan kewajiban yang tertentu pula. Konten dari konsep kewargaan ini—mulai dari bagaimana bentuk partisipasi yang dianggap sah hingga hak dan kewajiban apa yang dimiliki anggota komunitas—merupakan sesuatu yang diproduksi oleh berbagai kekuatan di dalam masyarakat (Turner, 1993; Isin dan Turner, 2003; Robet dan Tobi, 2011; O’Byrne, 2003).

Berbagai perspektif kewargaan berbeda antara satu sama lain dalam memandang bentuk *praktek* keanggotaan tersebut. Tradisi liberal, yang berangkat dari tradisi kontrak Thomas Hobbes dan John Locke, memandang bahwa negara bertugas untuk menjamin perlindungan atas properti individu. Karenanya, pemenuhan hak individu menjadi sesuatu yang diutamakan dalam tradisi ini. Sementara itu, tradisi republikan berpendapat bahwa komunitas politik dibentuk demi kebaikan bersama dari anggota komunitas itu. Oleh karena itu, berbeda dengan tradisi liberal, tradisi republikan mengatakan bahwa kewargaan terwujud tatkala warga secara bersama-sama memutuskan apa yang terbaik bagi diri mereka. Tradisi komunitarian memiliki pandangan yang lain lagi. Tradisi ini memandang bahwa warga suatu komunitas memiliki nilai-nilai yang serupa sebagai akibat dari proses sosialisasi yang mereka alami di dalam komunitas yang sama. Komunitas membentuk karakter dari individu anggotanya. Berbeda dengan tradisi liberal, tradisi komunitarian berpendapat bahwa arah dari suatu komunitas ditentukan berdasarkan apa

kepentingan komunitas tersebut dan bukan individunya. Di titik ini, tradisi komunitarianisme juga berbeda dari tradisi republikanisme. Kewargaan republikan meminta warga secara aktif merumuskan ke arah mana komunitas akan dibawa. Sementara itu, dalam tradisi komunitarian, warga tak lagi perlu dipertimbangkan argumennya karena diasumsikan bahwa seluruh warga sepakat pada—bahkan dibentuk oleh—nilai-nilai komunitas (Robet dan Tobi, 2011; Putri, 2012).

Meski demikian, ketiga tradisi besar kewargaan di atas memiliki satu permasalahan yang sama ketika dihadapkan pada isu kewargaan anak muda. Cockburn (2013) menunjukkan bahwa konsep warga cenderung mengandaikan bahwa warga adalah mereka yang sudah dewasa. Warga adalah mereka yang telah mampu berpikir dengan tenang, siap, dan tak lagi bersandar pada orang lain. Hal ini mengeksklusi anak muda dari kategori warga karena anak muda dipandang belum siap, labil, dan masih bersandar pada orang lain—terutama orang tua mereka. Kondisi ini memiliki implikasi lebih jauh karena dengan dieksklusikannya anak muda dari konsep warga, maka anak muda memperoleh akses yang cenderung minimal terhadap kekuasaan. Imbasnya, anak muda memiliki ruang partisipasi yang relatif terbatas. Anak muda tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengintervensi arah komunitas politik. Lebih jauh, anak muda bahkan tidak memiliki akses terhadap kebijakan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Klaim bahwa orang dewasa lebih berpengalaman membuat generasi tua dapat merumuskan kebijakan yang diperuntukkan bagi anak muda sekaligus membentuk anak muda sesuai dengan

standar-standar yang diyakini oleh generasi tua. Meski demikian, anak muda tak bertindak pasif. Mereka—yang memiliki perspektifnya tersendiri—dapat menegosiasikan tindakan serta perspektif dari generasi tua.

Dengan cara inilah konsep kewargaan anak muda perlu dipahami. Kewargaan anak muda—sebagai *praktik*—adalah buah dari negosiasi antara pandangan anak muda dan pandangan generasi tua yang seringkali mengambil wujud negara atau bahkan organisasi regional. Di satu sisi, terdapat konstruksi kewargaan anak muda yang merepresentasikan pandangan generasi tua dan entitas politik. Pandangan ini mengkonstruksi anak muda sesuai imajinasi generasi tua serta, dalam konteks politik kewargaan, membatasi partisipasi anak muda karena mereka dipandang belum mampu untuk bertindak mandiri. Di lain sisi, terdapat pandangan anak muda yang menegosiasikan perspektif generasi tua. Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana konstruksi kewargaan anak muda di ASEAN.

Anak Muda di Mata ASEAN

Pandangan ASEAN terhadap anak muda harus dibaca dalam kaitannya dengan harapan ASEAN terhadap masa depannya sendiri. Harapan-harapan ASEAN ini dapat dilihat dalam ASEAN Charter (2008a). Konstitusi ASEAN ini berbicara mengenai gambaran ideal Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) yang diharapkan oleh ASEAN. *Pertama*, ASEAN berusaha menciptakan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan bebas dari ancaman yang berasal dari luar maupun dalam Asia Tenggara. *Kedua*, ASEAN ingin membangun Asia Tenggara yang sejahtera.

Ketiga, ASEAN berusaha memperkuat demokrasi, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat, dan pembangunan identitas bersama ASEAN (*community-building*).

Lantas, bagaimana posisi anak muda di dalam masa depan Asia Tenggara itu? Pertama, generasi muda ASEAN harus memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai perdamaian dan demokrasi. Kedua, generasi muda harus merasa menjadi bagian dari ASEAN. Ketiga, generasi muda perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan agar menjadi angkatan kerja yang baik dan produktif. Keempat, generasi muda harus menjadi generasi yang aktif menjadi sukarelawan, khususnya di bidang operasi kemanusiaan seperti bencana alam dan usaha peningkatan kesadaran terhadap ASEAN di masyarakat (ASEAN, 2008b, 2008c, 2009).

Pandangan-pandangan di atas diambil dari dokumen-dokumen kunci yang merupakan turunan dari ASEAN Charter yang terbit pada 2008 atau setelahnya. Meski demikian, akan menjadi sebuah kekeliruan jika pandangan yang hadir dalam dokumen itu dianggap muncul begitu saja. Pandangan ASEAN terhadap anak muda di atas justru merupakan hasil dari proses yang panjang.

Proses ini setidaknya dapat diamati sejak lahirnya *Declaration of Principles to Strengthening ASEAN Collaboration on Youth* di Bangkok pada tahun 1983 hingga kemunculan *Manila Declaration on Strengthening Participation in Sustainable Youth Employment* pada tahun 2003. *Declaration of Principles to Strengthening ASEAN Collaboration on Youth* tahun 1983 merupakan salah satu dokumen paling awal ASEAN yang membahas anak muda. Dokumen ini, meskipun tidak secara

jelas memaparkan relevansi anak muda bagi ASEAN, menyatakan bahwa pengembangan anak muda adalah hal yang penting bagi ASEAN. ASEAN merasa perlu untuk mempersiapkan lapangan kerja, pendidikan, dan daya kompetisi anak muda. Anak muda juga perlu dididik sehingga bisa mendisiplinkan diri (*self-discipline*).

Alasan di balik pentingnya pengembangan anak muda baru dipaparkan secara lebih jelas dalam *Kuala Lumpur Agenda on ASEAN Youth Development* tahun 1997. Menurut ASEAN, anak muda perlu dikembangkan karena anak muda merupakan bagian besar dari populasi Asia Tenggara. Oleh karena itu, anak muda dapat dimanfaatkan untuk mendukung tujuan-tujuan ASEAN. Apa yang menarik dari Agenda Kuala Lumpur adalah bagaimana hubungan antara anak muda dan globalisasi. Dalam dokumen ini, ASEAN nampak memandang globalisasi dengan sedikit kekhawatiran, khususnya mengenai masa depan moralitas anak muda Asia Tenggara. Oleh karena itu, dalam dokumen ini, ASEAN menekankan pentingnya memperkuat moralitas dan spiritualitas anak muda Asia Tenggara sambil di saat yang sama mendorong mereka menjadi kompetitif di ekonomi global.

Sejak 1983 hingga 2003, ada dua dokumen yang paling penting, yaitu *Yangon 2000 Declaration on Preparing ASEAN Youth for the Challenges of Globalisation* (2000) dan *Manila Declaration on Strengthening Participation in Sustainable Youth Employment* (2003). Kedua dokumen ini bicara hal yang sama, yaitu tentang bagaimana semestinya hubungan antara anak muda dengan globalisasi. Sejak pertemuan di Kuala Lumpur tahun 1997,

ASEAN secara resmi telah menempatkan globalisasi sebagai masalah utama yang harus diperhatikan dalam membicarakan anak muda.

Deklarasi Yangon dan Deklarasi Manila, meskipun bicara topik yang sama, memiliki cara pandang yang cukup berbeda. Deklarasi Yangon berbicara tentang dua tugas anak muda. Pertama, anak muda bertugas melakukan aktivisme sosial. Dengan pilihan kata yang sangat eksplisit, ASEAN mendorong anak muda untuk membela kaum yang rentan dan termarginalisasi, serta menyebarluaskan nilai-nilai ASEAN. Anak muda diharapkan turun hingga ke akar rumput dan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi serta LSM. Kedua, ASEAN berusaha membekali anak muda dengan keterampilan dan pengetahuan sehingga anak muda bisa menyesuaikan diri dengan perekonomian global.

Deklarasi Manila mengambil pendekatan berbeda. Sejak awal, Deklarasi Manila mempostulatkan bahwa masalah globalisasi adalah masalah pengangguran. Oleh karena itu, berbeda dengan Deklarasi Yangon, Deklarasi Manila banyak berbicara tentang pengembangan keterampilan dan pembibitan jiwa kewirausahaan. Institusi pendidikan diminta untuk aktif dalam usaha-usaha ini. Aktivisme anak muda masih disinggung dalam Deklarasi Manila. Tetapi, aktivisme dilihat dengan cara yang amat berbeda. Menurut Deklarasi Manila, aktivisme anak muda hanyalah pelengkap bagi kebijakan negara. Dengan kata lain, ASEAN mengeliminasi kemungkinan bahwa aktivisme bisa menjadi oposisi bagi kebijakan negara. ASEAN tak melihat kemungkinan itu.

Dengan demikian, ada tendensi tertentu dalam cara ASEAN memandang

anak muda. Sejak 1983, gagasan bahwa anak muda adalah pekerja masa depan—dan oleh karena itu harus didesain agar memiliki daya saing—adalah gagasan yang tak pernah hilang. Seiring dengan waktu, gagasan ini justru jadi begitu dominan. Sementara itu, gagasan bahwa anak muda adalah aktivis sosial relatif menjadi gagasan marjinal. Tidak seperti gagasan mengenai anak muda sebagai pekerja yang sudah ada sejak dokumen 1983, gagasan anak muda sebagai aktivis baru memperoleh sedikit ruang di ASEAN pada tahun 1997 ketika Deklarasi Kuala Lumpur menyinggung pentingnya semangat voluntarisme. Gagasan ini memperoleh ruang yang besar pada pertemuan tahun 2000 di Yangon dan kembali redup tiga tahun kemudian di Manila.

Hal ini menjelaskan mengapa dalam cetak-biru Masyarakat ASEAN 2015, aktivisme anak muda relatif jarang disinggung. Melanjutkan semangat Deklarasi Manila, aktivisme anak muda dalam Masyarakat ASEAN, idealnya, menurut ASEAN, hanya menjadi pelengkap kebijakan negara. Oleh karena itu, aktivisme anak muda dalam Masyarakat ASEAN akan didukung oleh ASEAN sejauh aktivisme itu dilakukan untuk aksi humanitarian seperti penanganan bencana alam dan sosialisasi ASEAN kepada masyarakat. Keduanya adalah aktivisme yang semata-mata melengkapi negara.

Komitmen ASEAN untuk mengalokasikan sumber dayanya bagi pengembangan keterampilan anak muda jauh lebih besar. ASEAN bahkan mengarahkan institusi-institusi pendidikan untuk berperan aktif dalam membekali anak muda dengan keterampilan-keterampilan. Pandangan ini menjadi

dominan karena, seperti yang disebutkan Deklarasi Manila, masalah globalisasi adalah masalah pengangguran. Kesimpulan ini berbeda jauh dengan, misalnya, tendensi Agenda Kuala Lumpur yang cenderung melihat masalah globalisasi sebagai masalah benturan nilai Barat dengan moralitas dan spiritualitas Timur.

Analisis di atas dapat dibaca sebagai bagaimana ASEAN mengkonstruksi warga mudanya. Ketika sampai pada tahapan Masyarakat ASEAN, ASEAN mengkonstruksi anak muda sebagai sosok yang mestinya berjiwa *entrepreneur* sehingga dapat meningkatkan daya kompetitif kawasan. Di saat yang sama, ASEAN mendorong anak muda untuk mengubah gaya aktivisme mereka. Aktivisme anak muda diarahkan untuk mempertajam kebijakan negara. Aktivisme anak muda cenderung ditempatkan sebagai aspek komplementer dari kebijakan-kebijakan yang sudah diambil lebih dahulu oleh negara alih-alih menjadi oposisi bagi negara. Anak muda didorong untuk mengatasi masalah sosial di dalam masyarakat sambil di saat yang sama melakukan kegiatan wirausaha—sebuah konsep yang kerap disebut sebagai “*sociopreneurship*”.

Meski demikian, seperti yang telah diurai di atas, konsep kewargaan anak muda tersebut diciptakan dengan cara mengeksklusi kemungkinan oposisi antara anak muda dengan negara atau ASEAN. ASEAN berusaha menciptakan konstruksi kewargaan anak muda dimana bentuk tindakan yang dipandang baik adalah tindakan yang dapat melengkapi kebijakan negara dan bukan melakukan oposisi terhadapnya.

Pandangan ini memiliki akar yang cukup kuat dalam pandangan berbagai

generasi tua dalam negara-negara anggota ASEAN. Akar dari pandangan ini adalah pengutamakan harmoni di atas konflik. Dokumen *National Youth Development Policy* (1997) di Malaysia, misalnya, mengatakan bahwa anak muda Malaysia harus memiliki moralitas dan spiritualitas yang kuat. Di samping itu, mereka harus mengutamakan harmoni di atas konflik. Permasalahan harus diredam dan stabilitas harus diutamakan. Gerakan-gerakan anak muda juga harus harmonis dengan kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan oleh masyarakat (*planned by society*) (1997: Art. 5.4.). Penekanan terhadap spiritualitas dan moralitas dilakukan karena hal-hal ini dipandang dapat mendorong anak muda untuk memahami arti harmoni dan adat Timur. Ekspos yang terlalu besar terhadap kultur Barat—termasuk di antaranya konsep demokrasi dan HAM ala Barat—dirasa menjadi sumber masalah yang bukan hanya ‘mengubah’ anak muda, tetapi juga membuat budaya Timur menjadi luntur (Gan, dalam Daniels, 2005). Pandangan sejenis juga dapat ditemukan di Indonesia. Budiman (2012) menunjukkan bahwa anak muda yang melakukan partisipasi politik yang melawan negara cenderung dipandang secara negatif. Tindakan protes anak muda kerap dianggap menyimpang dari nilai-nilai Indonesia tanpa menimbang konten dari kritik anak muda tersebut. Anak muda yang melakukan protes adalah “*troublemaker*”. Sama seperti yang terjadi di Malaysia, pengutamakan harmoni di atas konflik juga nampak di Indonesia. Dalam konteks permasalahan anak muda, negara cenderung dipotret sebagai sebuah keluarga dimana para pemegang kekuasaan dipandang sebagai orang tua sementara anak muda yang melakukan protes sebagai anak. Dengan logika ini,

maka anak muda dipandang sebagai sosok yang belum utuh sehingga harus mendengarkan negara—orang tua—yang dipandang lebih berpengalaman. Selain itu, di dalam keluarga, konflik terbuka—terlebih oposisi yang tidak menghormati orang tua—dianggap sebagai sesuatu yang tabu (Yudhistira, 2010; Ramadan, 2015). Pandangan bahwa anak muda tidak cukup dewasa untuk membuat keputusan sehingga harus menghormati serta mengikuti keputusan orang dewasa juga dapat ditemui di Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Filipina (West, 2007; Chak, 2012; Ogena, 1999; Theis, 2007).

Ilustrasi di atas menunjukkan akar dari konstruksi kewargaan anak muda ASEAN. Konstruksi kewargaan anak muda ASEAN berakar dari pandangan bahwa anak muda dianggap sebagai sosok yang belum sempurna dan belum cukup pengalaman. Oleh karena itu, anak muda perlu mengikuti arahan dari generasi yang lebih tua. Generasi ini sendiri—seperti yang tergambarkan dalam Agenda Kuala Lumpur—memiliki kecurigaan yang cukup besar terhadap nilai-nilai Barat. Dalam isu HAM, misalnya, HAM seringkali dipandang sebagai bentuk neokolonialisme Barat yang tak cocok dengan semangat masyarakat Asia Tenggara yang lebih mengutamakan komunitas di atas individu (Eldrige, 2001; Weatherbee, 2010). Pengutamakan budaya Timur sebagai oposisi terhadap budaya Barat membuat ASEAN mengutamakan nilai-nilai seperti harmoni dan menolak adanya konflik yang terbuka—sesuatu yang dimungkinkan oleh ide demokrasi dan HAM itu sendiri. Di samping itu, penghormatan terhadap generasi tua dipandang sebagai sesuatu yang penting sehingga protes dilihat sebagai sebuah tindakan yang tak patut. Hal ini memberi

nuansa yang spesifik bagi konsep kewargaan anak muda ASEAN.

Anak Muda Asia Tenggara

Bagian sebelumnya telah menggambarkan bagaimana ASEAN memahami kewargaan anak muda. Anak muda, dalam perspektif tersebut, dianggap belum cukup mampu untuk mengambil keputusan yang matang. Karenanya, generasi tua menjadi pihak yang berhak mengambil keputusan bagi anak muda. Pada gilirannya, generasi tua—yang cenderung memahami nilai-nilai Barat dengan penuh curiga—mengarahkan anak muda sesuai dengan nilai-nilai Timur yang mereka percayai. Hal ini membuat anak muda dituntut untuk tidak menimbulkan konflik terbuka, menghormati otoritas negara dan orang tua, dan mengutamakan harmoni. Dengan meneliti dokumen-dokumen ASEAN, perspektif ini mewujudkan dalam konstruksi kewargaan anak muda yang didorong lebih untuk berwirausaha sambil melengkapi peran negara alih-alih menjadi oposisi bagi negara.

Meski demikian, anak muda di Asia Tenggara memiliki perspektifnya tersendiri. Berbagai catatan menunjukkan bahwa anak muda di Asia Tenggara memiliki tradisi partisipasi politik yang kuat. Di Indonesia, anak muda menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi kemerdekaan Indonesia. Anak muda Indonesia terlibat dalam perlawanan terhadap imperialisme. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, anak muda Indonesia menjadi “*moral force*” yang menekan negara. Pada pengujung 1990an, anak muda mengorganisasi diri dan terlibat dalam proses jatuhnya Soeharto. Spirit anti-imperialisme juga menjadi spirit yang menonjol dalam gerakan anak muda di Singapura dan Malaysia pada tahun

1950an sampai 1970an. Pada tahun 1950an, *Socialist Club* di Universitas Malaya menerbitkan jurnal *Fajar* yang mengkritisi kebijakan Inggris dan Amerika terkait dengan Perang Vietnam. Setelah itu, anak muda Malaysia juga menyentuh isu seperti kemiskinan dan hak atas tanah (Gungwu, 2013; Weiss, 2009). Hal serupa pun dapat ditemukan dalam sejarah anak muda Burma. Antara tahun 1920an sampai 1950an, anak muda Burma terlibat dalam melawan imperialisme. Pada tahun 1930an, para pelajar berusaha merebut kemerdekaan Burma dari tangan Inggris. Ketika U Ne Win melakukan kudeta dan memulai masa pemerintahan junta militer, anak muda Burma secara terus-menerus melakukan perlawanan terhadap negara. Anak muda Burma menuntut adanya otonomi bagi institusi akademis serta—terutama—menuntut agar Burma melakukan demokratisasi (Koo-Hoong, 2014). Perlawanan anak muda terhadap rezim yang tidak demokratis, selain terjadi di Burma dan Indonesia, juga terjadi di Thailand pada tahun 1973 ketika pelajar memprotes pemerintahan junta militer (Zimmerman, 1974).

Sketsa di atas menggambarkan—walau dalam bentuk yang cukup kasar—bagaimana ide partisipasi politik dapat dipahami dengan cara yang berbeda di antara anak muda Asia Tenggara. Berbeda dengan konstruksi kewargaan anak muda versi ASEAN, sketsa di atas menggambarkan bahwa menjadi oposisi sebetulnya merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah anak muda Asia Tenggara. Semangat penolakan terhadap imperialisme, keinginan menciptakan perubahan sosial, sikap kritis terhadap *status quo*, pembelaan terhadap kesetaraan dan demokrasi, serta keberanian untuk melakukan konfrontasi alih-alih merawat

harmoni menjadi sejumlah karakter yang mewarnai sejarah anak muda Asia Tenggara. Hal ini tentunya kontras dengan konstruksi kewargaan anak muda yang dibangun ASEAN—di mana ide oposisi justru cenderung dipinggirkan.

Perspektif anak muda Asia Tenggara seperti yang diuraikan di atas masih bisa ditemui dalam sejumlah peristiwa dalam beberapa tahun terakhir. Contoh kasus yang cukup menarik adalah fenomena protes yang dilakukan oleh pemuda Burma pada akhir 2014 karena pemerintah Burma berniat mengimplementasikan National Education Law (Barahmin, 2014 dan 2015). pada bulan Desember tahun 2014 lalu, ribuan mahasiswa Burma menyelenggarakan demonstrasi untuk menuntut reformasi sistem pendidikan tinggi. Demonstrasi yang disokong oleh gerakan pelajar—dengan All Burmese Federation of Student Unions (ABFSU) dan Youth for New Society (YNS) sebagai dua kelompok terbesar—serta berbagai elemen masyarakat sipil ini bertujuan memprotes undang-undang pendidikan tinggi yang baru di Burma. Undang-undang baru tersebut memungkinkan pembentukan National Education Commission (NEC) dan Higher Education Coordination Committee (HECC) yang dianggap sebagai perpanjangan junta militer. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat demokratisasi pendidikan tinggi dan terlebih membuat gerakan pro-demokrasi tak dapat tumbuh di dalam universitas. Pada Maret 2015, ketegangan memuncak dan berakibat pada ditangkapnya sejumlah aktivis pelajar di Burma. Menariknya, penangkapan ini diikuti oleh solidaritas dari berbagai organisasi anak muda di Asia Tenggara—mulai dari Filipina, Malaysia, hingga Indonesia—untuk anak muda di

Burma. Enam belas organisasi anak muda di Malaysia (DEMA, et.al, 2015), misalnya, memprotes tindakan represif pemerintah Burma:

“[W]e call upon the Burmese government to withdraw the National Education Law aimed at supervising the Burmese universities. Everyone living in Myanmar, including the students and academics, should be given the freedom to freely exercise their civil and political rights. There is absolutely no reason to single out the students and academics and subject them to the supervision of a special body. It is only natural that universities be allowed to run freely and independently from the state. We further urge the Burmese government to refrain from oppressing the students’ freedom to associate themselves in the form of students union. As part of the transformation to a mature democracy, it is vital that the Burmese government first demonstrate its ability to practice democratic value and basic civil liberties to relatively smaller institutions such as the universities. Failure to do so would only cast doubts on the Burmese government’s ability and sincerity in making Myanmar a true democracy.”

Solidaritas dari Akbayan Youth (2015) di Filipina serta SEMAR UI (2015) di Indonesia berikut ini juga menarik untuk dicermati:

“This violent crackdown is an abhorrent assault on democracy and the students and other protester’s fundamental human rights. Images circulating the internet of the tragic event are disturbing. They do not only showcase brave and brilliant students maltreated and abused, but they also depict how the government is finally casting away

its pretensions of democracy. It shows how the old regime refuses to perish, affirming an earlier investigation published by the UN warning Burma of sliding back to becoming a repressive nation.”

“Freedom is a mandatory right for every individual in a society. The spirit of the Burmese reformation brought by Daw Suu Kyi, along with the NLD (National League of Democracy), was to attempt to build such freedom. However, it seems that the image of a peaceful and just society is too priceless to be realized by a single entity. Particularly, when that entity has turned her back on students, whom are seen as a threat to negotiations between the Party and the military junta.”

Apa yang menarik dari uraian-uraian di atas adalah bagaimana spirit demokrasi, kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi juga bisa menjadi basis bagi gagasan anak muda di Asia Tenggara. Dengan berangkat dari basis ini, kewargaan anak muda memperoleh nuansa berbeda dibandingkan dengan apa yang dikonstruksi oleh ASEAN. Menjadi warga muda yang baik, dalam perspektif ini, berarti menjadi warga yang memperjuangkan HAM dan demokrasi dengan berbagai cara—termasuk di antaranya mengoposisi negara. Berbeda dengan konstruksi sebelumnya yang mencurigai konsep HAM dan demokrasi serta cenderung membatasi partisipasi anak muda, kewargaan yang berangkat dari uraian di atas justru berpijak pada HAM dan demokrasi serta cenderung memperluas partisipasi anak muda.

PENUTUP

Kewargaan anak muda dalam ASEAN dapat dipahami sebagai sesuatu yang berada dalam tegangan di antara dua

kutub. Di satu sisi, ASEAN cenderung memandang anak muda sebagai sosok yang belum matang dan perlu diarahkan. ASEAN lantas berusaha mengarahkan anak muda untuk mengikuti nilai-nilai Timur, menghormati otoritas, dan mengutamakan harmoni sambil di saat yang sama menumbuhkan jiwa bisnis dalam diri mereka. Di lain sisi, anak muda Asia Tenggara juga hidup dalam tradisi kewargaan dimana demokrasi dan HAM dipandang sebagai sesuatu yang patut diperjuangkan. Otoritas, alih-alih dihormati begitu saja, perlu dikritisi dan dilawan bila perlu. Sementara di satu kutub ada kecenderungan untuk membatasi partisipasi anak muda, kutub lain berusaha untuk membukanya. Praktek kewargaan anak muda yang spesifik dalam ASEAN akan ditentukan oleh sejauh mana dua kutub ini saling menarik satu sama lain.**

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alanen, L. (2011). “Explorations in Generational Analysis”, *Conceptualizing Child-Adult Relations*, eds. Leena Alanen dan Berry Mayall. London: Routledge Falmer.
- Beck, U. (2002). “Institutionalized Individualism”, *Individualization: Institutionalized Individualism and Its Consequences*, London: Sage, 2002.
- Budiman, M. et. Al. (2012). “New Enemy of the State: Youth in Post-New Order Indonesia”, *Youth: Future Agents or Guardians of Establishment*, ed. Wilhelm Hofmeister, Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Chak, S. (2011). “Cambodian Youth: Future Agents of Change?”,

- Youth: Future Agents or Guardians of Establishment*, ed. Wilhelm Hofmeister, Singapore: Konrad-Adenauer-Shiftung, 2012.
- Clarke, John, "The Origins of Childhood", *Key Issues in Childhood and Youth Studies*, ed. Derek Kassem et. al, Oxon: Routledge.
- Daniels, T. (2005). *Building Cultural Nationalism in Malaysia*, London: Routledge
- Giddens, A. (2008). "Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age", *The New Social Theory Reader*, ed. Steven Seidman and Jeffrey Alexander, Oxon: Routledge.
- Giroux, H. (2009). *Youth in a Suspect Society*, New York: Palgrave MacMillan.
- Gungwu, W. (2013). "Student movements: Malaya as outlier in Southeast Asia", *Journal of South East Asian Studies*, Vol. 44, Issue 03.
- Isin, Engin dan Bryan, T. (2002). "Citizenship Studies: An Introduction", *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage.
- Jones, E. dan Gaventa, J. (2002). "Concepts of citizenship: a review", *Institute of Development Studies*,
- Lash, S. (2002). "Individualization in a Non-Linear Mode", *Individualization: Institutionalized Individualism and Its Consequences*, London: Sage.
- Leccardi, C. dan Ruspini, E. (1996). "Introduction", *A New Youth: Young People, Generations and Family Life*, Hampshire: Ashgate.
- Leccardi, C. (1996). 'Facing Uncertainty: Temporality and Biographies in the New Century', *A New Youth: Young People, Generations and Family Life*, Hampshire: Ashgate.
- Lewis, J. (2006). "Introduction", *Children, Changing Families and Welfare State*, Massachussets: Edward Elgar.
- Lister, R. (2006). "An Agenda for Children", *Children, Changing Families and Welfare State*, Massachussets: Edward Elgar.
- O'Bryne, D. (2003). *The Dimensions of Global Citizenship*. London: Frank Class.
- Ogena, N. (1999). "How are the Filipino Youth Changing?", *Philippine Social Sciences Review*, Vol. 56, Nos. 1-4, Jan-Dec.
- Putri, V. (2012). *Denizenship*, Yogyakarta: Polgov.
- Theis, J. (2007). "Performance, Responsibility and Decision-Making: Child and Youth Participation in South East Asia, East Asia and the Pacific", *Children, Youth and Environment*, 17 (1).
- Weiss, M. (2009). "Intellectual Containment", *Critical Asian Studies*, 41:4.
- West, A. (2007). "Power Relationship and Adult Resistance to Children's Participation", *Children, Youth and Environment*, 17 (1).
- Wyn, J. dan White, R. (1997). *Rethinking Youth*, Crows: Allen & Unwin.
- Yudhistira, A. (2010). *Dilarang Gondrong!*, Tangerang: Marjin Kiri.
- Zimmerman, R. (1974). "Student Revolution in Thailand: The End of the Thai Bureaucratic Polity?", *Asian Survey*, Vol. 14, No. 6, Jun.

Dokumen Resmi

- ASEAN, *ASEAN Charter*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008.
- ASEAN, *ASEAN Economic Community Blueprint*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008.
- ASEAN, *ASEAN Political-Security Blueprint*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009.
- ASEAN, *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*, Jakarta: ASEAN Secretariat 2009.
- ASEAN, *Declaration of Principles to Strengthening ASEAN Collaboration on Youth* ASEAN, *Kuala Lumpur Agenda on ASEAN Youth Development*, 1997
- ASEAN, *Manila Declaration on Strengthening Participation in Sustainable Youth Employment*, 2003.
- ASEAN, *Yangon 2000 Declaration on Preparing ASEAN Youth for the Challenges of Globalization*, 2000. National Youth Development Policy

(1997)

Kuala Lumpur Agenda on ASEAN Youth Development (17 November 1997)

Rilis dan Internet

- Malaysian Youth and Students' Democratic Movement, et. al., 2015, PRESS STATEMENT ON THE POLICE CRACKDOWN ON STUDENTS' PROTEST IN MYANMAR.
- Akbayan Youth, 2015, STATEMENT OF SOLIDARITY FROM AKBAYAN YOUTH, THE PHILIPPINES.
- Semar UI, 2015, Solidarity Letter from Indonesia to Burma
- Barahmin, Andre. 11 Maret 2015. "Senjakala di Burma: Retaknya Aliansi Pelajar dan Aliasni Suu-Kyi", *Indoprogress*, diakses 4-15-2016
- Barahmin, A. 2014. "Kami adalah Masa Depan: Potret Gerakan Mahasiswa Burma", *Indoprogress*, diakses 4-15-2016